SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2026), Hal. 42-48

Kegagalan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Jawa Barat: Analisis Laporan OJK dan Pemberitaan Media

Tias Riska Nur Azizah

STAI Pelita Nusa Bandung Barat
tias.riska08@gmail.com

Kata Kunci:
BMT; Kegagalan BMT; Laporan OJK; Pemberitaan Media, Jawa Barat.

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi alasan di balik kegagalan BMT di Jawa Barat berdasar pada laporan OJK dan berita media. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Bandung (2019), sekitar 70% BMT tidak operasional. Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk menemukan faktor dan pola yang menyebabkan kegagalan BMT. Metode yang diterapkan merupakan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan data sekunder dari laporan OJK, media, jurnal, dan skripsi. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan: faktor internal (sumber daya manusia rendah, masalah pembiayaan, likuiditas yang buruk, dan pengelolaan yang lemah) serta faktor eksternal (tidak adanya LPS, pengawasan yang kurang ketat, dan krisis kepercayaan). Pola kegagalan mengikuti enam langkah: krisis kepercayaan, penarikan mendadak, penurunan likuiditas, masalah pembiayaan, gagal bayar, dan akhirnya penutupan. Kasus BMT Global Insani, BMT L-Risma, dan BMT SSB membuktikan pola ini. Sebagai kesimpulan, tingginya tingkat kegagalan BMT menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam regulasi dan pengawasan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.

Keywords:
BMT; BMT Failure; OJK Report; Media Coverage; West Java.

Abstract

This study evaluates the reasons behind the failure of BMTs in West Java based on reports from the OJK and media coverage. According to data from the Bandung Cooperative Office (2019), approximately 70% of BMTs are non-operational. The objective of this study is to identify the factors and patterns leading to the failure of BMTs. The methodology employed is a descriptive qualitative approach, utilising secondary data from OJK reports, media, journals, and theses. The research findings indicate two contributing factors to the failures: internal factors (poor human resources, financing issues, poor liquidity, and weak management) and external factors (the absence of the Deposit Insurance Corporation (LPS), insufficient supervision, and a crisis of confidence). The pattern of failure follows six stages: a crisis of confidence, a sudden run on deposits, a decline in liquidity, funding problems, default, and finally closure. The cases of BMT Global Insani, BMT L-Risma, and BMT SSB demonstrate this pattern. In

conclusion, the high failure rate of BMTs indicates systemic weaknesses in the regulation and supervision of Islamic microfinance institutions in Indonesia.

PENDAHULUAN

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan instansi keuangan mikro berbasis syariah yang berkembang dengan pesat di Indonesia sejak tahun 1990-an. BMT berfungsi penting dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta warga yang tidak terlayani oleh bank formal.[1] Namun, di balik pertumbuhannya yang signifikan, isu kebangkrutan dan penutupan BMT juga sering kali terjadi.

Menurut informasi dari Dinas Koperasi Kota Bandung hingga Desember 2019, dari 40 BMT yang terdaftar, hanya ada 12 BMT (30%) yang masih berjalan, sedangkan 28 BMT lainnya (70%) sudah tidak aktif atau tutup.[2] Situasi serupa juga dapat ditemui di berbagai daerah: di Jambi, dari 8 BMT hanya 3 yang masih bertahan; di Ciamis, dari 42 BMT hanya tersisa 7, dan di Tasikmalaya, dari 50 BMT, hanya 12 yang masih aktif.[3] Kasus BMT Global Insani di Cirebon berdampak merugikan bagi 4.300 nasabah,[4] sementara BMT L-Risma dan BMT SSB di Lampung Timur juga mengalami kebangkrutan yang merugikan nasabah akibat kurangnya dukungan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).[5]

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan BMT masih sangat rendah. BMT yang seharusnya menjadi fondasi ekonomi syariah justru rentan terhadap keruntuhan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan BMT serta pola-pola yang menyertainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan studi kasus yang kompleks. Sumber informasi berasal dari data sekunder yang mencakup laporan OJK, berita dari media, artikel ilmiah, tesis, dan dokumen dari Dinas Koperasi Kota Bandung. Untuk pengumpulan data, digunakan teknik studi dokumentasi dan analisis konten. Sedangkan untuk menganalisis data, digunakan pendekatan analisis tematik secara induktif yang melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, pengelompokan (faktor-faktor internal dan eksternal), interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari laporan OJK, media massa, serta penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM BMT DI JAWA BARAT

Menurut informasi dari Dinas Koperasi Kota Bandung hingga Desember 2019, terdapat 40 BMT yang terdaftar. Dari total ini, hanya 12 BMT (30%) yang masih beroperasi, sedangkan 28 BMT (70%) sudah tidak aktif. [1]

[1] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 136.
[2] Fajar Setiawan, "Strategi Sustainabilitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Model Matriks IFAS dan EFAS" (skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2020), 2-3
[3] Zulkifli Rusby, Zulfadli Hamzah, dan Hamzah, "Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)," *Jurnal Al-hikmah* 13, no. 1 (April 2016): 3.
[4] Tita Novitasari, "Peran OJK dalam Perlindungan Nasabah BMT Ilegal: Studi Kasus BMT Global Insani," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 9, no. 2 (November 2019): 123.
[5] Zainal Arifin, "Analisis Faktor Penyebab Runtuhnya BMT L-Risma dan BMT SSB Lampung Timur (Studi UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Sektor Keuangan)," *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 135.

Tabel 1
Daftar BMT di Kota Bandung Per Desember 2019

No.	Nama BMT	Status	No.	Nama BMT	Status
1.	BMT Baitul Muttaqin	Aktif	21.	BMT Cipta Mandiri	Tidak Aktif
2.	BMT Persis	Tidak Aktif	22.	BMT Daarut Tauhid	Aktif
3.	BMT Istiqomah Mustaqi	Tidak Aktif	23.	BMT Mitra Umat Islam	Tidak Aktif
4.	BMT Mitra madya	Tifak Aktif	24.	BMT ItQan	Aktif
5.	BMT At Taawun	Tidak Aktif	25.	BMT Aulia Insani Dago	Tidak Aktif
6.	BMT Mujahidin	Tidak Aktif	26.	BMT Harapan Umat	Tidak Aktif
7.	BMT Bahtera	Aktif	27.	BMT Dago	Tidak Aktif
8.	BMT Al Fitrah	Aktif	28.	BMT Nurul Ummah	Aktif
9.	BMT Gunadiennusa	Tidak Aktif	29.	BMT Citra Pasundan	Aktif
10.	BMT Insanu Kamil	Aktif	30.	BMT Amanah	Tidak Aktif
11.	BMT Bina Mulya	Tidak Aktif	31.	BMT Ma mur	Aktif
12.	BMT Mitrass	Tidak Aktif	32.	BMT Ekspor BSN	Tidak Aktif
13.	BMT Salam	Tidak Aktif	33.	BMT An Nur	Tidak Aktif
14.	BMT Khalifa	Tidak Aktif	34.	BMT Saudara	Tidak Aktif
15.	BMT Barrah	Aktif	35.	BMT Antassalam	Tidak Aktif
16.	BMT Puskopsyah	Tidak Aktif	36.	BMT El Tazkia	Aktif
17.	BMT Kholidiah	Tidak Aktif	37.	BMT Al Barokah	Tidak Aktif
18.	BMT Darul Fathona	Tidak Aktif	38.	BMT El Batasya	Tidak Aktif
19.	BMT Puskopsyah	Aktif	39.	BMT An-Nahl	Tidak Aktif
20.	BMT Al Muslimun	Tidak Aktif	40.	BMT Bina Insani	Tidak Aktif

Sumber: Dinas Koperasi Kota Bandung (2019)

B. PENYEBAB UTAMA KEGAGALAN BMT DI JAWA BARAT

1. Faktor SDM dan Manajerial

Rendahnya mutu sumber daya manusia menjadi faktor internal utama yang menyebabkan kegagalan BMT.[6] Kasus BMT L-Risma dan BMT SSB menunjukkan bahwa beban BMT diduga dimanfaatkan untuk hal-hal tidak penting, seperti pengadaan kendaraan inventaris kantor yang berlebihan dan pemberian gaji karyawan yang terlalu tinggi.[7] Pendirian BMT sering kali kehilangan esensi spiritualnya karena hanya dipandang dari sudut pandang bisnis, bukan sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat kecil.[8]

[6] Rusby, Hamzah, dan Hamzah, "Analisa Permasalahan BMT," 8-9.
[7] Arifin, "Analisis Faktor Penyebab Runtuhnya BMT," 132.
[8] M. Ridwan, "Ketika Syariah Dijual Murah: Membedah Kasus BMT Bermasalah" (makalah, n.p., n.d.), 2.

2. Faktor Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan macet atau Non-Performing Financing (NPF) menjadi salah satu penyebab yang sangat berpengaruh. Laporan laba rugi BMT L-Risma per 31 Desember 2021 menunjukkan bahwa pendapatan hanya sebesar Rp100.000.000, sementara total beban mencapai Rp1.018.000.000, sehingga mengalami kerugian bersih sebesar Rp918.000.000.[9] Pembiayaan macet ini terjadi akibat penggunaan dana yang tidak efektif, seperti untuk membuka cabang baru dan membeli inventaris, bukan untuk sektor riil.[10]

3. Faktor Likuiditas dan Permodalan

Krisis likuiditas merupakan penyebab langsung kegagalan BMT. Ketika berita negatif tersebar, para nasabah segera menarik dananya secara bersamaan.[11] Modal rata-rata BMT L-Risma dan BMT SSB hanya sekitar Rp70-100 juta, sehingga tidak cukup untuk menanggulangi kerugian yang terjadi.[12]

4. Faktor Tata Kelola dan Pengawasan Internal

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT L-Risma dan BMT SSB masih sangat lemah. Masih ditemukan adanya akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan DPS dari pihak eksternal belum ada.[13] Fungsi pengawasan dari dinas koperasi juga sangat minim.[14]

5. Faktor Eksternal

BMT L-Risma dan BMT SSB tidak menerapkan LPS, padahal UU No. 4 Tahun 2023 Pasal 19 mewajibkan pembentukan LPS untuk lembaga keuangan mikro.[15]

Setelah adanya UU No. 1 Tahun 2013, OJK diberikan kewenangan untuk mengawasi BMT.[16] Namun, BMT Global Insani dinyatakan ilegal karena belum terdaftar di OJK dan tidak memiliki izin usaha.[17] BMT ini turut merugikan 4.300 nasabah dengan modus investasi di jahe dan jabon.[18]

C. POLA UMUM KEGAGALAN BMT

Berdasarkan kajian kasus, teridentifikasi pola kegagalan yang berulang sebagai berikut[19]:

1. Krisis Kepercayaan. Terdapat isu negatif yang beredar di kalangan masyarakat[20]

[9] Arifin, "Analisis Faktor Penyebab Runtuhnya BMT," 137.
[10] Arifin, "Analisis Faktor Penyebab Runtuhnya BMT," 134.
[11] Bambang Maryadi, "Dampak Kepailitan BMT Terhadap Motivasi Anggota BMT Mitra Ummat Nasional Kec. Rumbia Dalam Menabung" (skripsi, IAIN Metro, 2020), 19.
[12] Arifin, "Analisis Faktor Penyebab Runtuhnya BMT," 128.
[13] Arifin, "Analisis Faktor Penyebab Runtuhnya BMT," 135.
[14] Ridwan, "Ketika Syariah Dijual Murah," 3.
[15] Ridwan, "Ketika Syariah Dijual Murah," 3.
[16] Novitasari, "Peran OJK dalam Perlindungan Nasabah BMT Ilegal," 119.
[17] Novitasari, "Peran OJK dalam Perlindungan Nasabah BMT Ilegal," 123.
[18] Novitasari, "Peran OJK dalam Perlindungan Nasabah BMT Ilegal," 123-124.
[19] Pola ini disintesis dari Arifin (2023), Maryadi (2020), dan Novitasari (2019).
[20] Maryadi, "Dampak Kepailitan BMT," 19.

2. Rush Penarikan Dana. Para nasabah melakukan penarikan simpanan secara besar-besaran[21]
3. Likuiditas Menurun. Dana kas BMT habis akibat tingginya biaya operasional[22]
4. Pembiayaan Macet. BMT tidak dapat memberikan pembiayaan baru[23]
5. Kegagalan Keuangan. BMT tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya
6. Penutupan Operasional. BMT menghentikan aktivitasnya, sering kali diiringi dengan pelarian pengurus

D. TNJAUAN KASUS BERDASARKAN LAPORAN OJK DAN PEMBERITAAN MEDIA

1. BMT Global Insani

BMT Global Insani terhubung dengan PT Surabaja Mandiri yang sedang mengalami kebangkrutan. BMT ini menipu 4. 300 nasabah melalui skema investasi pada jahe dan jabon, serta perjalanan haji dan umroh. OJK menganggap BMT ini ilegal karena tidak terdaftar. Pada bulan Maret 2017, Pengadilan Niaga memutuskan bahwa BMT Global Insani bangkrut.[24]

2. BMT L-Risma dan BMT SSB

Kedua BMT ini mengalami kegagalan akibat penyalahgunaan dana, pembiayaan yang terhambat, risiko likuiditas, tidak adanya LPS, lemahnya DPS, dan pembiayaan dari bank konvensional (BRI, Bukopin, Danamon) yang bertentangan dengan prinsip syariah.[25]

KESIMPULAN

Pertama, penyebab terjadinya kegagalan BMT di Jawa Barat mencakup faktor internal seperti sumber daya manusia yang kurang berkualitas, kredit bermasalah, masalah likuiditas, dan manajemen yang kurang efektif, serta faktor eksternal yang meliputi ketidakadaan LPS, pengawasan OJK yang tidak ketat, dan krisis kepercayaan dari masyarakat. Kedua, kegagalan BMT mengikuti pola yang sistematis yang terdiri dari enam tahap yakni kehilangan kepercayaan, pengambilan dana secara besar-besaran, penurunan likuiditas, terhentinya pembiayaan, gagal membayar, hingga penutupan operasional. Ketiga, peristiwa pada BMT Global Insani di Cirebon serta BMT L-Risma dan SSB di Lampung Timur menegaskan pola tersebut dan sekaligus menunjukkan bahwa BMT yang beroperasi tanpa izin OJK dan yang mengandalkan bank konvensional cenderung lebih rentan terhadap kegagalan. Tingginya tingkat kegagalan BMT yang mencapai 70% di Kota Bandung mencerminkan adanya kelemahan mendasar dalam pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.

[21] Maryadi, "Dampak Kepailitan BMT," 19.
[22] Arifin, "Analisis Faktor Penyebab Runtuhnya BMT," 137.
[23] Arifin, "Analisis Faktor Penyebab Runtuhnya BMT," 134.
[24] Novitasari, "Peran OJK dalam Perlindungan Nasabah BMT Ilegal," 123-124.
[25] Arifin, "Analisis Faktor Penyebab Runtuhnya BMT," 125-126, 138.

REFERENSI

Arifin, Zainal. "Analisis Faktor Penyebab Runtuhnya BMT L-Risma dan BMT SSB Lampung Timur (Studi UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Sektor Keuangan)." *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 125-142.

Maryadi, Bambang. "Dampak Kepailitan BMT Terhadap Motivasi Anggota BMT Mitra Ummat Nasional Kec. Rumbia Dalam Menabung." Skripsi, IAIN Metro, 2020.

Novitasari, Tita. "Peran OJK dalam Perlindungan Nasabah BMT Ilegal: Studi Kasus BMT Global Insani." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 9, no. 2 (November 2019): 117-131.

Ridwan, M. "Ketika Syariah Dijual Murah: Membedah Kasus BMT Bermasalah." Makalah, n.p., n.d.

Rusby, Zulkifli, Zulfadli Hamzah, dan Hamzah. "Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)." *Jurnal Al-hikmah* 13, no. 1 (April 2016): 1-12.

Setiawan, Fajar. "Strategi Sustainabilitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Model Matriks IFAS dan EFAS." Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.